

Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ulfa Puspa Wanti Widodo¹, Mutiara Rachma Ardhiani²

^{1,2}Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

ulfapuspaww@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 8 April 2022

Disetujui : 10 April 2022

Dipublikasi : 13 April 2022

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the fiscal and monetary policies implemented by the Indonesian government for economic recovery during the pandemic on economic growth. This study uses a quantitative approach and hypothesis testing is carried out using the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) method. The sample used is the rate of economic growth in Indonesia from 2010 to 2020. The test results show that the PEN program has a positive impact on consumption levels, FDI, DDI, interest rates, and tax revenues but has not been able to provide a positive stimulus for government spending and GDP. It can be concluded that the implementation of the PEN program has been effective for macroeconomic components in Indonesia but not yet effective enough for increasing GDP as a whole.

Keywords: Fiscal Policy, Monetary Policy, Economic Growth, Gross Domestic Product (GDP)

PENDAHULUAN

Tahun 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi seluruh dunia karena adanya virus korona atau *Coronavirus Disease-19* (Covid-19). Covid-19 merupakan jenis virus korona terbaru yang awalnya ditemukan di Wuhan, Cina. Penyebaran Covid-19 yang cukup mudah dan cepat serta dampak yang mengerikan bagi penderita dengan penyakit bawaan mengakibatkan virus ini tergolong berbahaya (World Health Organization, 2020). Pemerintah dari berbagai negara langsung menerapkan karantina, *lockdown* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai reaksi tindakan preventif untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Beberapa negara yang telah menerapkan *lockdown* antara lain Cina, Prancis, India, Indonesia, Italia, Malaysia, Filipina, Singapura, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Australia (Wikipedia, 2020).

Adanya pandemi Covid-19 menggerus perekonomian dunia sebesar USD 8,8 triliun atau 9,7%. Beberapa negara yang mengalami penurunan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) antara lain Amerika Serikat (-0,3%), Singapura (-2,2%), Jerman (-2,3%), dan Cina (-6,8%). Aktivitas perekonomian di Indonesia pun tidak luput dari perlambatan akibat pandemi ini, dimana realisasi pendapatan negara hanya mencapai 31,21% pada triwulan kedua 2020. Penerimaan pajak dari seluruh jenis mengalami pertumbuhan negatif (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020b). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menggerakkan perekonomian dan menjaga stabilitas perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha di sektor riil maupun sektor keuangan. Kebijakan tersebut tertuang dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berupa Penurunan tarif PPh Badan, PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh 22 Impor, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Pengurangan angsuran PPh 25. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020a).

Kebijakan fiskal dan moneter yang dipilih pemerintah diharapkan dapat memberikan efek positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan tersebut dipercaya dapat mendorong pemulihan ekonomi ketika perekonomian mengalami krisis (Jawadi, Mallick, dan Sousa, 2015). Program PEN yang diberikan pemerintah

diharapkan dapat mendorong belanja masyarakat sehingga tingkat PDB tidak tumbuh negatif (Munandar, 2020). Berdasarkan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, realisasi program PEN selama tahun 2020 masih kurang maksimal, tercatat hingga akhir tahun 2020 realisasi anggaran masih mencapai 83,4% atau Rp 579,78 triliun dari target sebesar Rp 695,2 triliun. Sisa anggaran PEN 2020 sebanyak Rp 115,42 triliun akan direalisasikan di tahun 2021 dan diharapkan bisa membawa dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi di Indonesia (DDTC, 2020).

Dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap PDB dapat dilihat dalam penelitian Bhattarai dan Trzeciakiewicz (2016), Nurlina dan Zurjani (2018) serta Karpova, Tischenko, Ostapenko, dan Ivanov (2020) dimana mereka sependapat bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi pertumbuhan PDB, baik dalam jangka pendek (melalui investasi dan belanja pemerintah), maupun jangka panjang (melalui pajak pendapatan modal dan investasi publik). Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Setiawan (2018) dan Canelli, Fontana, Realfonzo, dan Passarella (2021) yang mendapati kebijakan pemerintah dalam menanggulangi krisis masih belum cukup efektif. Efek realisasi belanja pemerintah yang meningkat hanya dapat mempengaruhi perekonomian dalam jangka pendek saja (Burger dan Calitz, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi di masa pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data perekonomian Indonesia yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia, dan BPS. Penelitian menggunakan sampel data perekonomian di Indonesia tahun 2010-2020.

STUDI LITERATUR

Teori Makroekonomi Keynes

Ilmu makroekonomi merupakan ilmu yang mempelajari variabel-variabel seperti pendapatan nasional, kesempatan kerja, jumlah uang beredar, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran internasional secara agregat (keseluruhan). Kelompok yang dipelopori oleh John Maynard Keynes (kelompok Keynesian) berpendapat bahwa pasar memiliki struktur monopolistik dimana informasi yang ada tidak sempurna dan asimetris serta barang atau jasa yang dipertukarkan sifatnya heterogen. Menurut kelompok Keynesian, perekonomian dapat dikelola melalui kebijakan fiskal dan moneter yang ditentukan oleh pemerintah (Faruq dan Mulyanto, 2017).

Dalam teori makroekonomi, perubahan satu variabel ekonomi dapat berpengaruh terhadap variabel makroekonomi yang lainnya. Menurut kelompok Keynesian, kebijakan makro merupakan cara pemerintah untuk mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan penerimaan pajak dan belanja pemerintah. Melalui peningkatan belanja pemerintah, ada dampak pengganda fiskal (*multiplier effect*) yang terjadi dari pemerintah ke sektor swasta. Ketika belanja pemerintah naik, maka permintaan agregat akan naik yang akan diikuti dengan kenaikan harga dan jika kenaikan permintaan tersebut melebihi penawaran maka akan terjadi inflasi. Bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi sehingga permintaan uang akan menurun, kredit konsumen menurun, biaya investasi naik, konsumen akan lebih tertarik untuk menabung, dan permintaan agregat akan menurun (Mankiw, 2013).

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal terdiri dari kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif digunakan untuk menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak sehingga daya beli masyarakat menurun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2010). Menurut kelompok Keynesian, adanya kebijakan ekspansif akan menimbulkan dampak pengganda fiskal terhadap permintaan secara keseluruhan dan penawaran secara keseluruhan akan merespon kenaikan tersebut (Abimanyu, 2005).

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, Indonesia masih menggunakan kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif pada tahun 2021.

Kebijakan tersebut mendorong belanja fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga tingkat defisit dan utang negara (Bisnis Indonesia, 2021). Menurut Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, prioritas kebijakan fiskal Indonesia pada tahun 2021 dibagi menjadi 4, yaitu melanjutkan dan mempercepat program PEN, penguatan reformasi struktural, program reformasi anggaran, dan program percepatan pembangunan nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020a). Kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam program PEN meliputi PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh 25, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Penurunan tarif PPh Badan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020a).

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam mengendalikan besaran moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi makro yang tercermin dalam stabilitas harga, membaiknya *output* riil, dan banyaknya lapangan kerja. Kebijakan moneter terdiri dari kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong kegiatan ekonomi, sedangkan kebijakan kontraktif bersifat sebaliknya. Ketika perekonomian mengalami resesi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter yang mengakomodasi fluktuasi perekonomian yang disebut dengan *procyclical monetary policy* atau *accomodative monetary policy*. Kebijakan tersebut dapat mengatasi adanya gejolak struktural (*shock*) atau fluktuasi siklus kegiatan ekonomi yang ada ketika resesi. Bauran kebijakan moneter-fiskal dapat digunakan untuk mendukung *procyclical monetary policy* mencapai tujuan kebijakan makro secara optimal (Warjiyo dan Solikin, 2003). Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2020) dalam program PEN antara lain:

1. Penurunan suku bunga kebijakan
2. Stabilisasi nilai tukar rupiah
3. Pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) agar tersedianya pendanaan bagi eksportir, importir dan UMKM
4. Menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis
5. Mempercepat digitalisasi sistem pembayaran
6. Relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto
7. Injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar baik likuiditas rupiah maupun valas
8. Mempermudah bekerjanya pasar uang dan pasar valas di domestik maupun luar negeri

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan suatu konsep dalam perhitungan pendapatan nasional yang diperoleh dari total produksi (barang dan jasa) yang dihasilkan suatu negara pada suatu waktu tertentu (Sukirno, 2013). Barang dan jasa yang diproduksi tersebut diukur dalam nilai pasar dan dapat digunakan untuk menganalisis kondisi perekonomian suatu negara (McEachern, 2000). PDB mengukur total pendapatan seluruh masyarakat dengan total belanja negara pada saat yang bersamaan dan tidak menyertakan kegiatan di luar pasar, kualitas lingkungan, dan distribusi pendapatan dalam perhitungannya (Mankiw, 2013). PDB dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan pengeluaran dimana PDB terdiri dari nilai produk barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (RT), lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR), dan pemerintah serta ditambah dengan investasi dan total ekspor neto (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pengembangan Hipotesa

Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Penelitian ini didasari oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan gejolak (*shock*) terhadap perekonomian di Indonesia, dimana tingkat perekonomian tergerus sebesar 5,4% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020b). Selain penurunan PDB, perusahaan di Indonesia juga mengalami krisis keuangan. Sebanyak 82,85% perusahaan mengalami penurunan pendapatan selama pandemi Covid-19, dengan proporsi 82,29% UMB dan 84,20% UMK (Badan Pusat Statistik, 2020). Sebagai upaya untuk menstabilkan perekonomian, pemerintah Indonesia

mengeluarkan stimulus kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang tertuang dalam Program PEN (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020a).

Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter dipercaya dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal secara tidak langsung dapat meningkatkan PDB dalam suatu negara melalui penundaan pajak, penerapan *tax holiday* sementara, penurunan tarif pajak, pengakuan kemudian atas kerugian pajak, dan pembatalan atau pengurangan kontribusi jaminan sosial. Melalui stimulus kebijakan fiskal tersebut beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dapat diminimalisir. Harapannya dengan menurunnya beban perusahaan maka laba yang diperoleh perusahaan dapat dimaksimalkan. Jika perusahaan dapat memperoleh laba yang tinggi, maka secara tidak langsung kesejahteraan karyawannya tidak akan terganggu dan tingkat konsumsi rumah tangga dapat dipertahankan, keinginan masyarakat untuk berinvestasi akan bertambah sehingga pengangguran dapat berkurang dan ketika tingkat pengangguran kecil maka pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik dan akhirnya penerimaan negara juga akan meningkat. Dari sisi moneter, kenaikan suku bunga yang ada akan dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk berinvestasi dan meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi akan memicu kenaikan kebutuhan tenaga kerja sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Ketika produksi meningkat, jumlah ekspor dan devisa negara dapat bertambah dan pada akhirnya mata uang rupiah akan menguat dan perekonomian Indonesia dapat membaik.

Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memberi dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal secara tidak langsung dapat meningkatkan PDB dalam suatu negara melalui penundaan pajak, penerapan *tax holiday* sementara, penurunan tarif pajak, pengakuan kemudian atas kerugian pajak, dan pembatalan atau pengurangan kontribusi jaminan sosial. Selain itu, kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan PDB (Karpova et al., 2020). Dampak kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia juga terkonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan Nurlina dan Zurjani (2018) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak dan tingkat suku bunga terbukti berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap perekonomian Indonesia. Melalui tarif pajak yang rendah, keinginan masyarakat untuk berinvestasi akan bertambah sehingga pengangguran dapat berkurang dan ketika tingkat pengangguran kecil maka pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik dan akhirnya penerimaan negara juga akan meningkat. Dari sisi moneter, kenaikan suku bunga yang ada akan dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk berinvestasi dan meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi akan memicu kenaikan kebutuhan tenaga kerja sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Ketika produksi meningkat, jumlah ekspor dan devisa negara dapat bertambah dan pada akhirnya mata uang rupiah akan menguat dan perekonomian Indonesia dapat membaik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bhattarai dan Trzeciakiewicz (2016) dimana kebijakan fiskal dapat meningkatkan PDB dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Di sisi lain, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk meningkatkan PDB masih cukup meragukan efektivitasnya bila melihat penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018), Burger dan Calitz (2020) serta Canelli et al. (2021). Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) menyimpulkan bahwa kenaikan belanja pemerintah dan tingkat suku bunga di Indonesia masih memiliki besaran pengganda yang lemah terhadap PDB. Kenaikan belanja pemerintah hanya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan akan berdampak negatif dalam jangka panjang (Burger dan Calitz, 2020). Canelli et al. (2021) juga menemukan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi krisis masih belum cukup untuk memulihkan perekonomian yang ada. Tingkat PDB tidak akan kembali seperti saat sebelum Covid-19 melanda. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H: Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) efektif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

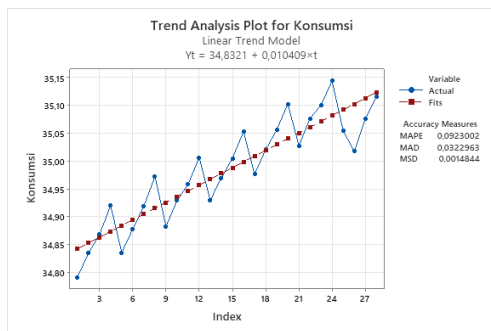
METODE

Penelitian ini menggunakan data tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumentasi yang berasal dari *website* Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia, dan BPS. Penelitian ini menggunakan proksi tingkat konsumsi, *Foreign Direct Investment (FDI)*, *Domestic Direct Investment (DDI)*, belanja pemerintah, tingkat suku bunga, penerimaan pajak, dan Produk Domestik Bruto (PDB). Pengujian data dilakukan dengan menggunakan metode *Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)* atau metode Box-Jenkins. Metode ini dipilih karena menganggap seluruh variabel yang digunakan memiliki hubungan interdependensi antar variabel. Salah satu kelebihan dari metode ini adalah hasil peramalan jangka pendek yang cukup akurat.

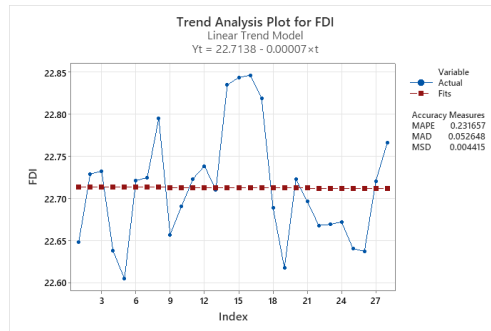
HASIL

Analisis Stasioneritas

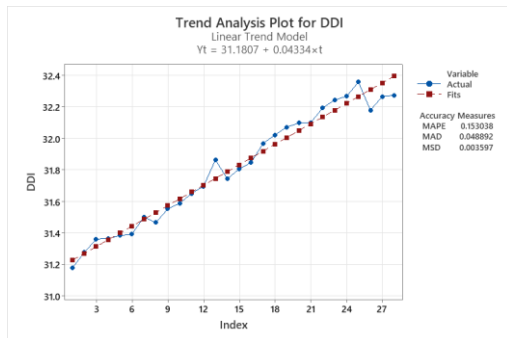
Uji stasioneritas dilihat dari plot data masing-masing variabel yang digunakan dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



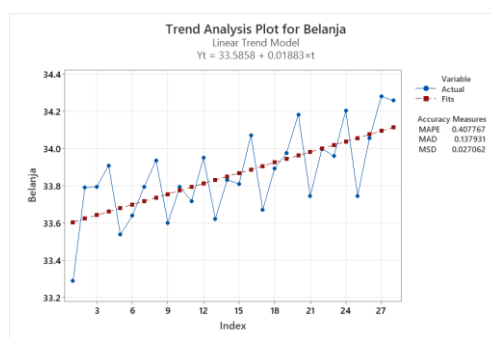
Gambar 1 Plot Data Tingkat Konsumsi



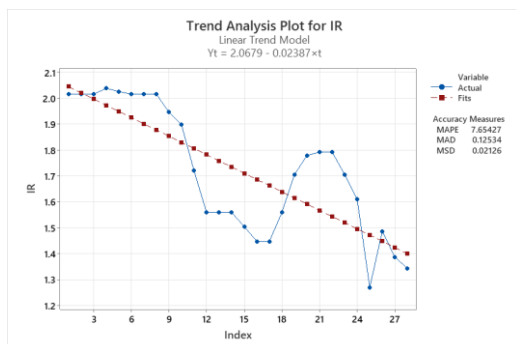
Gambar 2 Plot Data FDI



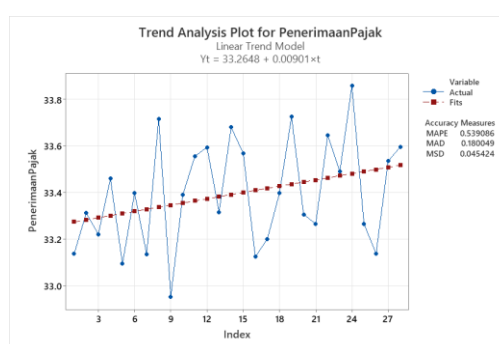
Gambar 3 Plot Data DDI



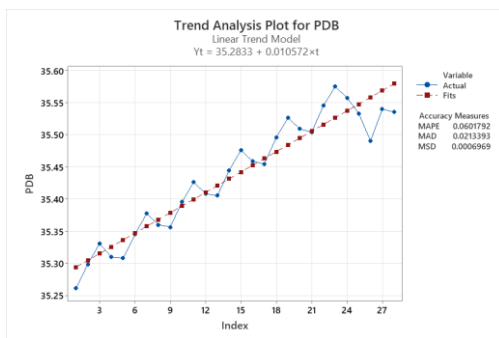
Gambar 4 Plot Data Belanja Pemerintah



Gambar 5 Plot Data Suku Bunga

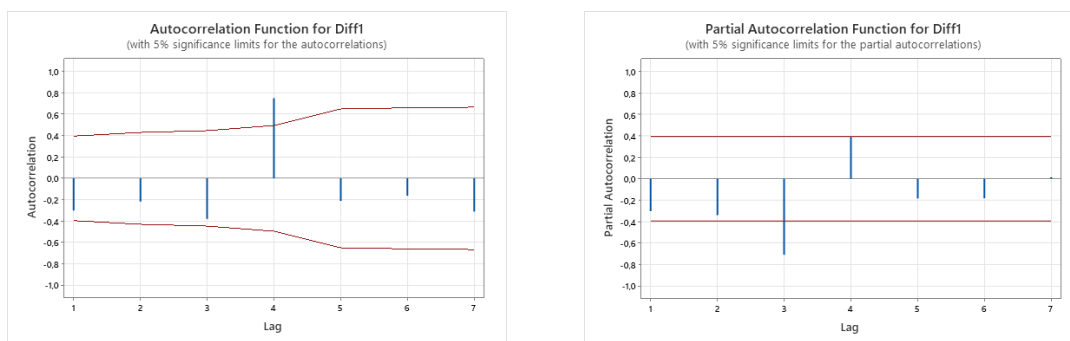


Gambar 6 Plot Data Penerimaan Pajak

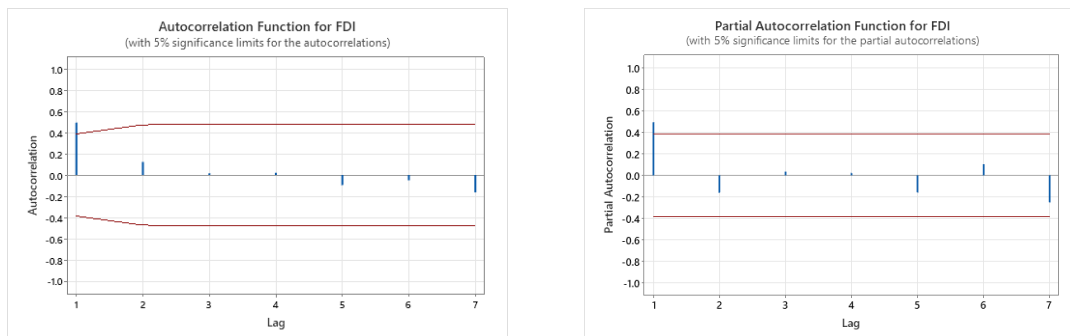


Gambar 7 Plot Data PDB

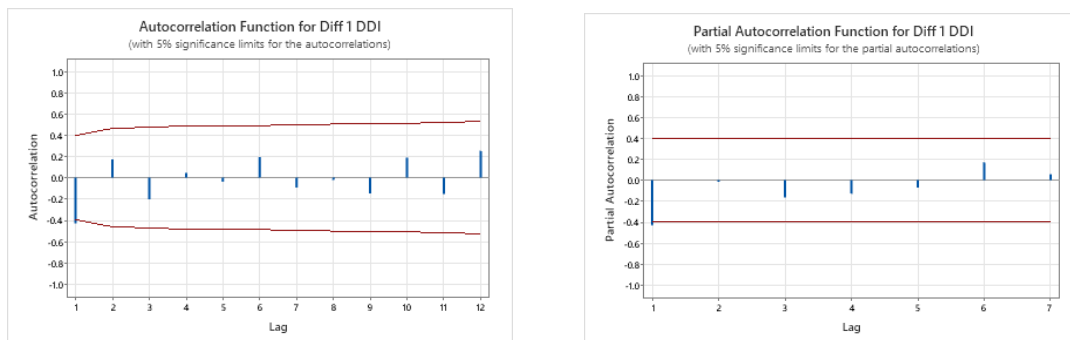
Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat data non-stasioner pada hampir seluruh variabel yaitu DDI, Belanja Pemerintah, Suku Bunga, Penerimaan Pajak, dan PDB. Sedangkan data stasioner terdapat pada variabel FDI. Untuk data non-stasioner, dilakukan *first differencing* agar data menjadi stasioner. Data yang sudah stasioner dapat dilihat dari plot gambar yang semakin horizontal dan pada plot ACF dan PACF, tidak ada garis yang melebihi batas signifikansi. Berikut di bawah ini plot ACF dan PACF dari data *Difference*:



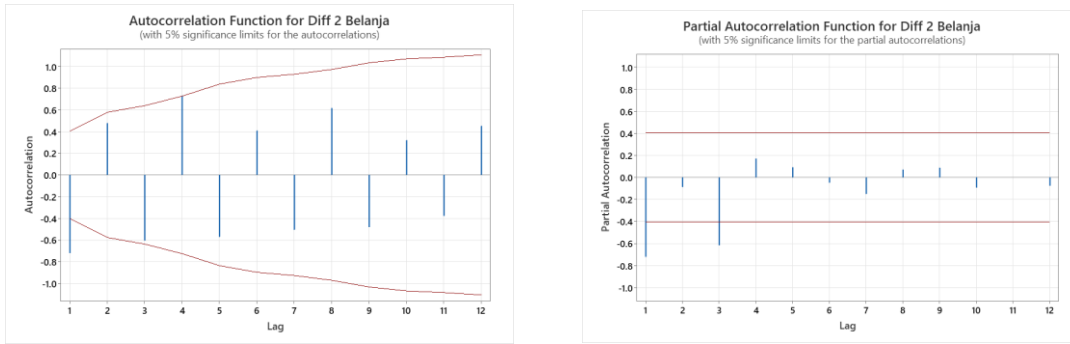
Gambar 8 Plot ACF dan PACF Konsumsi (*Diff 1*)



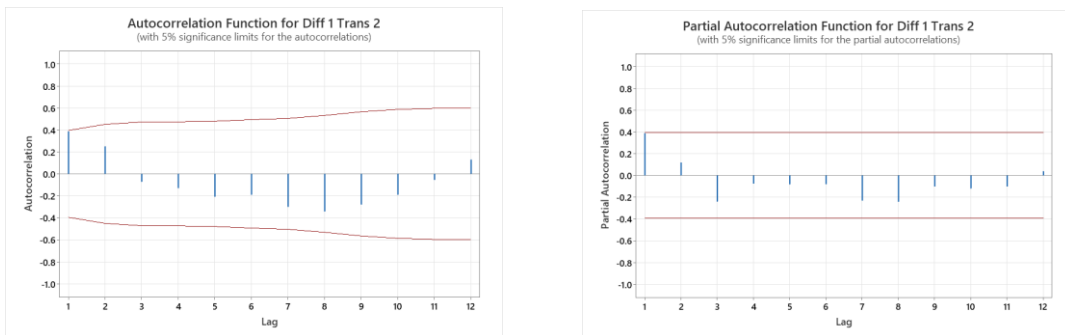
Gambar 9 Plot ACF dan PACF FDI (Stasioner/*Diff 0*)



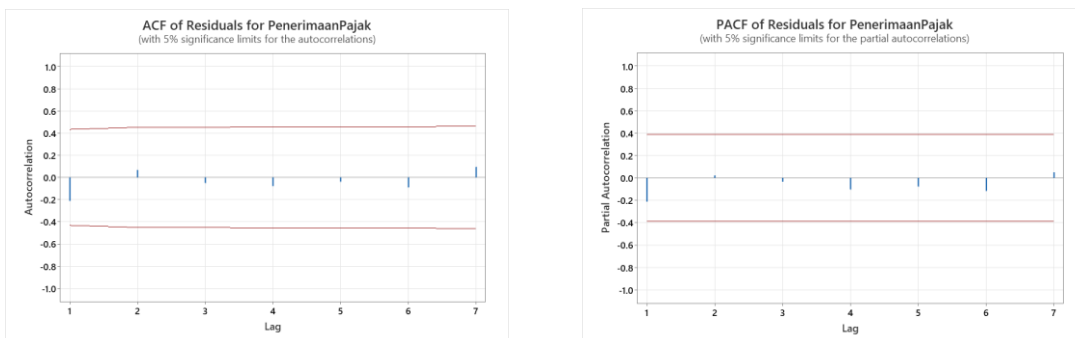
Gambar 10 Plot ACF dan PACF DDI (*Diff 1*)



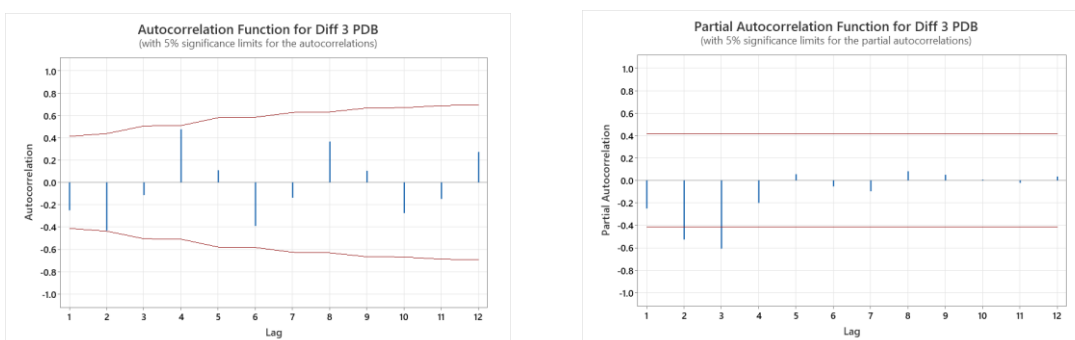
Gambar 11 Plot ACF dan PACF Belanja Pemerintah (*Diff 2*)



Gambar 12 Plot ACF dan PACF Suku Bunga (*Diff 1*)



Gambar 13 Plot ACF dan PACF Penerimaan Pajak (*Diff 1*)



Gambar 14 Plot ACF dan PACF PDB (*Diff 3*)

Estimasi dan Uji Parameter

Estimasi model ARIMA dapat dilihat dari jumlah *difference*, plot ACF dan plot PACF. Hasil pengujian pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Estimasi dan Uji Parameter

Variabel	Ordo AR (PACF)	Ordo MA (ACF)	Diff.	Model ARIMA	Sig.
Konsumsi	3	0	1	(3,1,0)	0,000
FDI	1	0	0	(1,0,0)	0,005
DDI	1	1	1	(1,1,1)	0,023 0,000
Belanja Pemerintah	3	1	2	(3,2,1)	0,000 0,002
Suku Bunga	0	1	1	(0,1,1)	0,015
Penerimaan Pajak	0	1	1	(0,1,1)(0,1,1) ^{4*}	0,002
PDB	2	2	3	(2,3,2)	0,009 0,000

*Menggunakan model SARIMA

Sumber: Data diolah penulis

Dari tabel di atas, dapat dilihat model sementara dari masing-masing variabel yaitu:

- Konsumsi (3,1,0) dengan *p-value* 0,000 sehingga model dikatakan layak
- FDI (1,0,0) dengan *p-value* 0,005 sehingga model dikatakan layak
- DDI (1,1,1) dengan *p-value* 0,023 dan 0,000 sehingga model dikatakan layak
- Belanja Pemerintah (3,2,1) dengan *p-value* 0,000 dan 0,002 sehingga model dikatakan layak
- Suku Bunga (0,1,1) dengan *p-value* 0,015 sehingga model dikatakan layak
- Penerimaan Pajak (0,1,1)(0,1,1)⁴ dengan *p-value* 0,002 sehingga model dikatakan layak
- PDB (2,3,2) dengan *p-value* 0,009 dan 0,000 sehingga model dikatakan layak

Uji Kecukupan Model

Model peramalan dikatakan tidak memiliki *white noise* dan dapat digunakan untuk peramalan jika memiliki *P-value* > α (0,05). Hasil dari uji kecukupan model (*Ljung-Box test*) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Hasil Ljung-Box Test

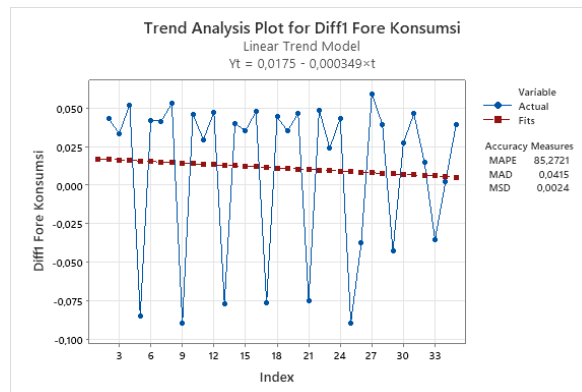
Variabel	<i>P-value</i>	Kesimpulan
Konsumsi	Lag 12 (0,404) Lag 24 (0,680)	Tidak ada <i>white noise</i> , model baik
FDI	Lag 12 (0,411) Lag 24 (0,663)	Tidak ada <i>white noise</i> , model baik
DDI	Lag 12 (0,400) Lag 24 (0,432)	Tidak ada <i>white noise</i> , model baik
Belanja Pemerintah	Lag 12 (0,056)	Tidak ada <i>white noise</i> , model baik
Suku Bunga	Lag 12 (0,807) Lag 24 (0,778)	Tidak ada <i>white noise</i> , model baik
Penerimaan Pajak	Lag 12 (0,317)	Tidak ada <i>white noise</i> , model baik
PDB	Lag 12 (0,210)	Tidak ada <i>white noise</i> , model baik

Sumber: Data diolah penulis

PEMBAHASAN

Forecasting Tingkat Konsumsi

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel Konsumsi yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh model ARIMA (3,1,0) yang akan digunakan sebagai dasar peramalan. Berikut hasil peramalan Konsumsi:

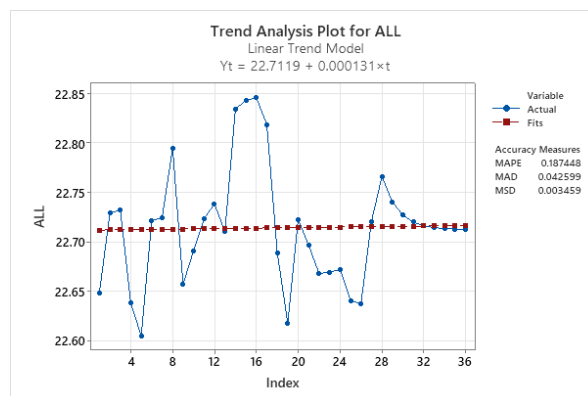


Gambar 15 Forecasting Tingkat Konsumsi

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa terdapat pola penurunan tingkat konsumsi di semester awal dan peningkatan konsumsi di semester akhir. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperkirakan penurunan tingkat konsumsi juga terjadi di Q1-Q2 tahun 2021 dan 2022 tetapi penurunannya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, diperkirakan ada peningkatan tingkat konsumsi di Q3 dan Q4 tahun 2021 dan 2022. Penurunan tingkat konsumsi di semester awal diakibatkan karena penyerapan APBN masih belum maksimal di awal tahun dan dan menumpuk sehingga pada akhir tahun selalu terjadi peningkatan tingkat konsumsi (Irianto, 2021). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah diperkirakan mampu memberikan stimulus positif terhadap tingkat konsumsi negara yang pergerakannya cukup stabil dari tahun ke tahun, bahkan diperkirakan penurunan tingkat konsumsi di tahun 2021 dan 2022 tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulan tersebut sejalan dengan penelitian Bhattacharai dan Trzeciakiewicz (2016) dimana kebijakan fiskal mendorong tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Forecasting Tingkat FDI

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel FDI yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh model ARIMA (1,0,0) yang akan digunakan sebagai dasar peramalan. Berikut hasil peramalan FDI:



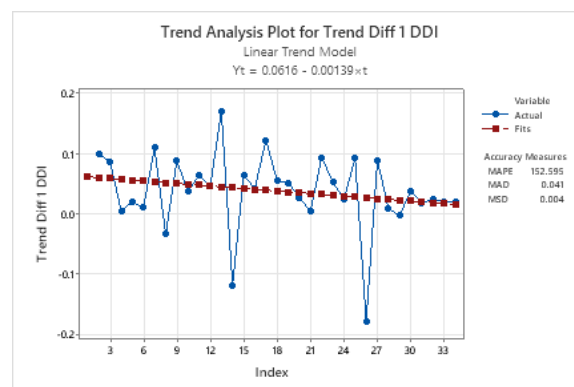
Gambar 16 Forecasting FDI

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa menurun drastis setelah lag ke 28 (tahun 2020 Q4) sampai lag ke 32 (2021 Q4) dan berangsur stagnan hingga lag 36 (tahun 2022 Q4) dan memiliki nilai MAPE (18,7%) dimana peramalan dapat dikatakan sudah cukup baik dan memadai. Penurunan FDI dapat diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang terjadi dari Desember 2019 hingga saat ini. Adanya pandemi tersebut mengakibatkan perekonomian seluruh dunia turun drastis sehingga kemampuan investasi dari negara di dunia juga ikut menurun. Masyarakat di seluruh dunia cenderung melakukan *saving* daripada investasi karena banyak individu yang terpaksa

kehilangan pekerjaan karena pandemi. Berdasarkan hasil peramalan, dapat dilihat bahwa program PEN yang dilaksanakan pemerintah sudah cukup memberikan stimulus yang baik bagi tingkat FDI. Peningkatan FDI menjadi hal krusial dalam efektivitas pertumbuhan PDB (Bhattarai & Trzeciakiewicz, 2016). Meskipun tidak dapat mengembalikan tingkat FDI ke kondisi sebelum pandemi, penurunan tingkat FDI semakin mengecil di akhir tahun 2021-2022. Hal tersebut dapat terjadi karena masifnya vaksinasi yang dilakukan pemerintah Indonesia yang telah mencapai 56% masyarakat Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Cakupan vaksinasi di seluruh dunia telah mencapai 58% per akhir Maret 2022 (BBC, 2022) dan dengan adanya hal tersebut, diperkirakan akan mendorong pertumbuhan tingkat investasi di tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya.

Forecasting Tingkat DDI

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel DDI yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh model ARIMA (1,1,1) yang akan digunakan sebagai dasar peramalan. Berikut hasil peramalan DDI:

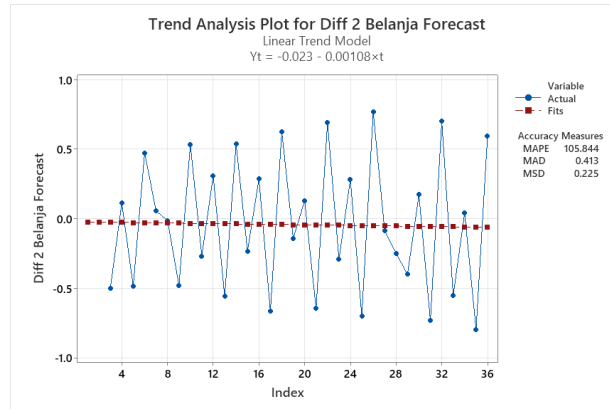


Gambar 17 Forecasting DDI

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa tingkat DDI mengalami penurunan drastis di lag ke-27 (2020 Q3) hingga lag ke-29 (2021 Q1) dan berangsur-angsur kembali ke kondisi normal hingga lag ke-36 (2022 Q4). Kembalinya tingkat investasi domestik menjadi tanda bahwa perekonomian Indonesia mulai menggalat. Sejak pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat dihapus, masyarakat dapat beraktivitas normal kembali dan secara otomatis hal tersebut mendorong peningkatan transaksi ekonomi dan secara tidak langsung masyarakat dapat meningkatkan kemampuan investasinya karena penghasilan yang dimiliki mulai meningkat kembali. Hal tersebut menjadi sebuah indikator keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menggerakkan perekonomian negara melalui program PEN. Kebijakan yang mendorong pertumbuhan DDI secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian pula, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Bhattarai & Trzeciakiewicz, 2016).

Forecasting Tingkat Belanja Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel Belanja Pemerintah yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh model ARIMA (3,2,1) yang akan digunakan sebagai dasar peramalan. Berikut hasil peramalan Belanja Pemerintah:

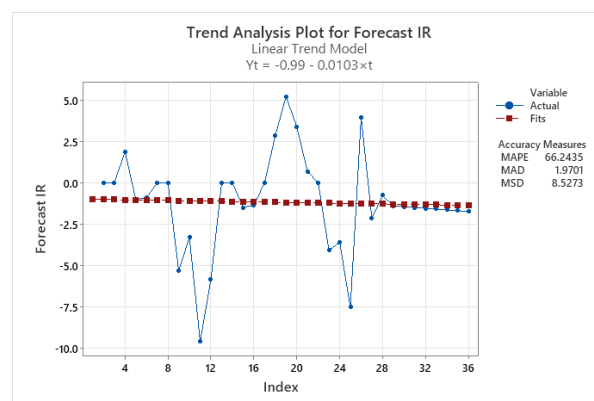


Gambar 18 Forecasting Belanja Pemerintah

Dari grafik di atas, dapat dilihat pergerakan belanja pemerintah sangat fluktuatif hingga lag ke-36 (2022 Q4). Fluktuasi tingkat belanja pemerintah dipengaruhi oleh perubahan postur APBN, dimana sebagian besar anggaran difokuskan untuk penanggulangan dampak Covid-19. Hal tersebut dapat diakibatkan karena pemerintah hingga saat ini masih fokus dengan percepatan vaksinasi, terlebih semakin banyak varian Covid-19 yang ada sehingga pemerintah masih menekan tingkat belanja negara dan lebih menggunakan APBN yang ada untuk memberikan bantuan dan subsidi bagi masyarakat. Lesunya tingkat belanja pemerintah juga dapat diakibatkan belum maksimalnya penyerapan APBN pada waktu-waktu tertentu (Irianto, 2021). Selain itu, penerimaan negara yang menurun juga mengakibatkan APBN yang dimiliki negara sangat terbatas yang berakibat ke pemangkasan dan perubahan struktur APBN. Hal tersebut diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun 2022 karena pandemi Covid-19 yang tidak kunjung selesai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan PEN masih belum cukup memstimulus tingkat belanja pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Burger dan Calitz (2020) mendapati bahwa tingkat belanja pemerintah masih belum mampu merangsang pertumbuhan ekonomi.

Forecasting Tingkat Suku Bunga

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel Suku Bunga yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh model ARIMA (0,1,1) yang akan digunakan sebagai dasar peramalan. Berikut hasil peramalan Suku Bunga:



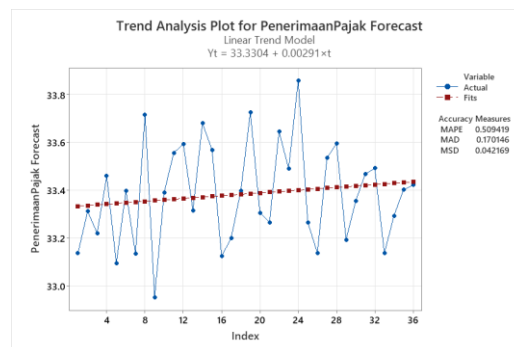
Gambar 19 Forecasting Suku Bunga

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga pada lag ke 29 (2021 Q1) mengalami penurunan hingga lag ke 36 (2022 Q4). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan moneter pemerintah dalam menurunkan suku bunga BI diperkirakan akan terus dilakukan hingga Q4 tahun 2022 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam masa pandemi ini. Kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah cukup berhasil untuk menjaga tingkat suku bunga yang stabil dimasa pandemi ini. Tingkat suku bunga berpengaruh

terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia (Nurlina & Zurjani, 2018). Stimulus penurunan suku bunga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan bisnis dengan memanfaatkan suku bunga kredit yang rendah. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman yang bersifat produktif yang berguna bagi masyarakat untuk dapat membuka lapangan pekerjaan baru di masa pandemi. Selain itu, stimulus tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan bisnis luar negeri karena rendahnya biaya pinjaman bagi pengusaha ekspor dan impor.

Forecasting Tingkat Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel Penerimaan Pajak yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh model SARIMA (0,1,1)(0,1,1)⁴ yang akan digunakan sebagai dasar peramalan. Berikut hasil peramalan Penerimaan Pajak:

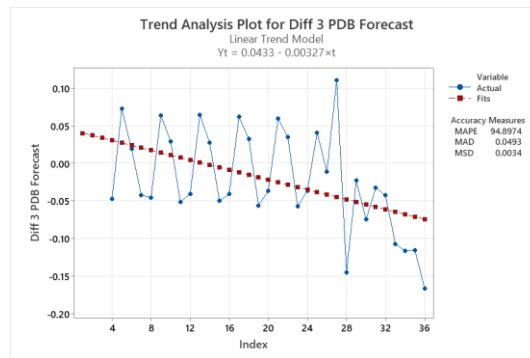


Gambar 20 Forecasting Penerimaan Pajak

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa terdapat fluktuasi penerimaan pajak yang terjadi secara musiman, dimana pada awal tahun penerimaan pajak masih rendah dan di akhir tahun akan meningkat secara drastis. Fluktuasi penerimaan pajak diakibatkan pada awal tahun wajib pajak (WP) cenderung menunda untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga pada akhir tahun akan terjadi peningkatan penerimaan pajak (Sari, 2018). Kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah memiliki efek positif karena beberapa stimulus seperti PPh21 DTP, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 impor, dan pengurangan angsuran PPh 25 dapat meringankan kewajiban WP sehingga secara tidak langsung tingkat penerimaan pajak cenderung stabil, tidak terlalu terdistorsi dengan pandemi. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, penurunan tarif PPh Badan berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Munandar, 2020). Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Setiawan (2018) dan Karpova et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa stimulus fiskal berdampak baik bagi tingkat penerimaan pajak dan efektif dalam meningkatkan pertumbuhan PDB. Dampak peningkatan pertumbuhan PDB yang ditimbulkan dapat bertahan dalam jangka panjang (Bhattarai & Trzeciakiewicz, 2016).

Forecasting Tingkat PDB

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel PDB yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh model ARIMA (2,3,2) yang akan digunakan sebagai dasar peramalan. Berikut hasil peramalan PDB:



Gambar 21 Forecasting PDB

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada lag ke 29-32 (tahun 2021) tingkat PDB akan mengalami kenaikan dan pada lag ke 33-36 tingkat PDB akan menurun secara drastis. Kebijakan PEN yang diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2020 dan berakhirnya pembatasan mobilitas masyarakat pada awal tahun 2021 diperkirakan membawa dampak positif bagi masyarakat. Pembukaan pembatasan tersebut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sehingga secara tidak langsung tingkat PDB akan naik selama tahun 2021. Proyeksi penelitian ini sesuai dengan proyeksi *International Monetary Fund* (IMF) dimana PDB riil Indonesia tahun 2021 akan meningkat sebesar 4,8% (International Monetary Fund, 2021).

Penurunan tingkat PDB yang diramalkan akan terjadi di tahun 2022 diperkirakan sebagai akibat dari munculnya varian baru dari Covid-19 yang lebih cepat menular (Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Indonesia, 2021) sehingga ada kemungkinan pemerintah akan memberlakukan pembatasan mobilitas kembali. Adanya pembatasan kembali dapat menurunkan transaksi ekonomi di dalam masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa akan menurun dan penawaran dari produsen secara otomatis akan mengalami penurunan juga. Kemungkinan tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam tingkat PDB. Kebijakan pemerintah masih belum cukup untuk mengatasi efek krisis yang ditimbulkan karena pandemi dan tingkat PDB tidak dapat dikembalikan seperti saat sebelum pandemi terjadi (Canelli et al., 2021).

KESIMPULAN

Perekonomian global sedang mengalami penurunan sejak adanya Covid-19, begitu pula dengan Indonesia yang hanya membukukan realisasi pendapatan negara sebesar 31,21% pada triwulan kedua 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020b). Pemerintah Indonesia memberlakukan program PEN sebagai stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Proksi program PEN yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat konsumsi, FDI, DDI, belanja pemerintah, tingkat suku bunga, dan penerimaan pajak, sedangkan tingkat perekonomian Indonesia diproksikan dengan tingkat PDB. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2020 dan menggunakan metode ARIMA.

Berdasarkan pengujian peramalan, diperoleh hasil bahwa program PEN melalui kebijakan fiskal dan moneter dapat memberikan dampak positif bagi tingkat konsumsi, FDI, DDI, suku bunga dan penerimaan pajak. Dampak terhadap faktor-faktor tersebut dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, program PEN diperkirakan masih belum mampu memberikan stimulus positif bagi belanja pemerintah, dan PDB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PEN sudah efektif bagi komponen makro ekonomi di Indonesia tetapi belum cukup efektif bagi peningkatan PDB secara keseluruhan. Hal tersebut diakibatkan karena masih banyak faktor-faktor lain di luar proksi penelitian ini yang dapat mempengaruhi pertumbuhan PDB.

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain terbatasnya data perekonomian sebelum tahun 2010 sehingga sampel yang digunakan dalam peramalan kurang beragam serta masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan PDB yang belum diteliti oleh penulis, seperti tingkat pendapatan, tingkat tenaga kerja, tingkat produksi, tingkat harga barang, dan lain

sebagainya. Hal tersebut dapat diatasi pada penelitian selanjutnya dengan memperlebar sampel yang digunakan serta dengan menambahkan proksi lain yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB.

SUMBER RUJUKAN

- Abimanyu, A. (2005). Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di Indonesia Aplikasi Model Makro MODFI dan CGE-INDORANI. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 1(1), 1–36.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19. In *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku usaha*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Produk Domestik Bruto*. <https://www.bps.go.id/subject/169/produk-domestik-bruto--pengeluaran-.html>
- Bank Indonesia. (2020). *Perkembangan Langkah-Langkah BI dalam Hadapi COVID-19*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Perkembangan-Langkah-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19.aspx>
- BBC. (2022). *Covid vaccines: How fast is progress around the world?* BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-56237778>
- Bhattarai, K., & Trzeciakiewicz, D. (2016). Macroeconomic impacts of fiscal policy shocks in the UK: A DSGE analysis. *Economic Modelling*, 61(October), 321–338. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.10.012>
- Bisnis Indonesia. (2021). *BKF Tegaskan Kebijakan Fiskal 2021 Masih Ekspansif Konsolidatif*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210128/10/1349183/bkf-tegaskan-kebijakan-fiskal-2021-masih-ekspansif-konsolidatif>
- Burger, P., & Calitz, E. (2020). Covid-19, Economic Growth and South African Fiscal Policy. *South African Journal of Economics*, 89(1), 3–24. <https://doi.org/10.1111/saje.12270>
- Canelli, R., Fontana, G., Realfonzo, R., & Passarella, M. V. (2021). Are EU Policies Effective to Tackle the Covid-19 Crisis? The Case of Italy. *Review of Political Economy*. <https://doi.org/10.1080/09538259.2021.1876477>
- DDTC. (2020). *Sri Mulyani: Serapan Anggaran PEN Sepanjang 2020 Capai 83%*. https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-serapan-anggaran-pen-sepanjang-2020-capai-83-26713?page_y=913
- Faruq, U. Al, & Mulyanto, E. (2017). *Sejarah Teori-Teori Ekonomi* (Issue 1).
- International Monetary Fund. (2021). IMF Country Report No. 21/46. In *IMF Staff Country Reports: Vol. 21/46*. <https://doi.org/10.5089/9781498373890.002>
- Irianto, K. B. (2021). *Mengapa Belanja Pemerintah Selalu Meningkatkan di Akhir Tahun?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20211223183110-14-301570/mengapa-belanja-pemerintah-selalu-meningkat-di-akhir-tahun>
- Jawadi, F., Mallick, S. K., & Sousa, R. M. (2015). Fiscal and monetary policies in the BRICS: A panel VAR approach. *Economic Modelling*, 58, 535–542. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.06.001>
- Karpova, V. V., Tischenko, V. F., Ostapenko, V. N., & Ivanov, Y. B. (2020). Anti-Crisis Fiscal Measures in the European Union during the COVID-19 Pandemic and their Impact on GDP. *Journal of Tax Reform*, 6(3), 225–243. <https://doi.org/10.15826/jtr.2020.6.3.083>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Indikator Penanganan COVID-19 Konsisten Menunjukkan Perbaikan Seminggu Terakhir – Sehat Negeriku*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220315/4039533/indikator-penanganan-covid-19-konsisten-menunjukkan-perbaikan-seminggu-terakhir/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Mendisain Koordinasi Fiskal- Moneter yang Efektif*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2010/07/06/145340385736232-mendisain-koordinasi-fiskal-moneter-yang-efektif>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020a). *Ini Empat Prioritas Kebijakan Fiskal 2021*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-empat-prioritas-kebijakan-fiskal-2021/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020b). *Kebijakan Fiskal Pemerintah Yang Pruden Dalam Menghadapi Pandemi*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran->

- pers-kebijakan-fiskal-pemerintah-yang-pruden-dalam-menghadapi-pandemi/
Mankiw, N. G. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Penerbit Salemba Empat.
McEachern, W. A. (2000). *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*. Penerbit Salemba Empat.
Munandar, M. H. (2020). Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemy On Indonesian Economic Defense. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 133–142. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38631>
Nurlina, & Zurjani. (2018). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. *Quantitative Economics Journal*, 2(3), 126–136. <https://doi.org/10.24114/qej.v2i3.17434>
Sari, A. A. (2018). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang. *Soumatera Law Review*, 1(2), 233–250.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Indonesia. (2021). *Penjelasan WHO tentang Omicron, Varian Baru COVID-19*. Covid19.Go.Id. <https://covid19.go.id/p/berita/penjelasan-who-tentang-omicron-varian-baru-covid-19>
Setiawan, H. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi di Indonesia dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 03(2), 23–43.
Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
Warjiyo, P., & Solikin. (2003). Kebijakan Moneter Indonesia. In *Jurnal Manajemen Maranatha* (Vol. 3, Issue 1). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
Wikipedia. (2020). *COVID-19 lockdowns - Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns
World Health Organization. (2020). *Coronavirus*. Health Topics. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1